

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penilaian merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu proses pembelajaran. Dikatakan sangat penting, karena penilaian dapat digunakan dalam memberikan informasi penting, diantaranya adalah menentukan hasil belajar peserta didik, mengukur sejauh mana keberhasilan guru dalam melaksanakan pembelajaran selama proses belajar mengajar, dan mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik dalam mengikuti dan memahami materi pelajaran yang telah diajarkan. Informasi-informasi tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi banyak pihak, diantaranya adalah peserta didik, guru, orang tua, sekolah, dinas pendidikan, bahkan secara umum dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan di Indonesia.

Bagi para peserta didik, hasil penilaian yang telah disusun oleh para guru dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atas proses belajar yang telah diikuti selama ini. Ketika terdapat kekurangan dalam suatu bidang studi, peserta didik dapat meningkatkan intensitas belajar mereka pada bidang tersebut. Selain itu, penilaian tersebut dapat dijadikan motivasi bagi peserta didik untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai dan kemampuan mereka pada bidang ilmu yang mereka minati. Dengan demikian, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana kemampuan mereka dalam mengikuti pembelajaran, serta bidang ilmu apa saja yang menjadi minat mereka, yang nantinya hal tersebut akan mempengaruhi bidang ilmu yang akan mereka didalami di dunia perkuliahan.

Bagi para guru, hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan para guru tersebut dalam memberikan materi pelajaran kepada peserta didik selama proses pembelajaran. Hasil belajar peserta didik yang rendah, menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh para guru. Sebaliknya, hasil belajar peserta didik yang baik, menunjukkan bahwa para guru mampu menguasai kelas, dan mampu memberikan materi pelajaran kepada peserta didik dengan baik. Artinya, penilaian dapat dijadikan

acuan/patokan bagi sekolah-sekolah untuk mengetahui apakah para guru sudah melakukan proses belajar mengajar dengan benar, dan mampu menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik dengan baik.

Sementara itu, hasil penilaian yang baik juga dapat dijadikan sebagai gambaran pelaksanaan pendidikan dalam suatu sekolah. Pimpinan di sekolah bisa memperhatikan sinergi antara masing-masing bagian yang ada di sekolah, apakah sinergi tersebut sudah mengarah pada tujuan pendidikan. Sekolah juga bisa mengadakan suatu kegiatan atau penambahan fasilitas sekolah untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan guru dalam mengajar, dan meningkatkan kemampuan serta kreativitas peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran.

Dalam skala yang lebih luas, penilaian yang baik dapat dijadikan acuan bagi dunia pendidikan, karena dari hasil penilaian tersebut, maka dapat dilihat peta kemampuan guru dalam melakukan pembelajaran secara keseluruhan. Melalui sistem penilaian ini, maka pihak yang berwenang (pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dapat mengambil langkah-langkah konkret melalui hasil penilaian secara keseluruhan. Selain itu, pemerintah juga bisa mengevaluasi mengenai pendidikan yang telah dilaksanakan, apakah sudah mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari segi kemampuan guru dalam mengajar, maupun dari segi kemampuan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah (di era Menteri M.Nuh) adalah memberlakukan kurikulum 2013 sebagai pengganti kurikulum KTSP. Kemudian kebijakan ini sedikit direvisi oleh pemerintahan yang baru (melalui Menteri Anis Baswedan), dengan memberhentikan pelaksanaan kurikulum 2013 bagi sekolah yang baru menjalankan selama satu semester, dan tetap melanjutkan pelaksanaan kurikulum 2013 bagi sekolah yang telah menjalankan kurikulum tersebut selama tiga semester.

Seiring dengan diubahnya kurikulum pendidikan Indonesia dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ke Kurikulum 2013, ternyata juga mempengaruhi guru dalam melaksanakan tugas mereka. Ada beberapa hal yang berubah, diantaranya

dalam hal penilaian. Penilaian dalam kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Tujuan dari standar penilaian tersebut yaitu untuk menjamin perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penilaian. Hal ini berdampak pada tata cara penilaian yang tidak hanya dilakukan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi dilakukan dalam bentuk deskriptif dan administratif. Tidak sedikit guru yang mengeluh mengenai sistem penilaian yang terdapat pada kurikulum 2013. Hal ini dibuktikan dengan artikel-artikel terkini (terlampir di bagian lampiran) yang menyatakan bahwa guru-guru mengalami kesulitan dalam implementasi kurikulum 2013, khususnya penilaian kurikulum 2013. Selain itu, pernyataan guru yang telah diobservasi di awal penelitian juga senada, yaitu guru tersebut masih bingung dalam implementasi penilaian kurikulum 2013. Tuntutan untuk menggambarkan secara deskriptif dan rinci mengenai keseluruhan penilaian siswa menjadi suatu kesulitan bagi guru. Selain memakan waktu dan tenaga yang sangat banyak, guru jelas akan terhalang oleh banyaknya jumlah siswa. Semua siswa harus dinilai secara deskriptif baik pada aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Padahal penilaian adalah suatu komponen yang sangat penting dalam sebuah proses pembelajaran di dalam kelas. Penilaian merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Penilaian itu sendiri adalah proses pengumpulan informasi ataupun bukti-bukti belajar yang dilakukan guru terhadap siswa yang digunakan untuk pengambilan keputusan berupa penentuan *grade*/nilai, perbaikan hasil belajar siswa, dan perbaikan cara mengajar guru. Oleh karena itu, guru harus benar-benar memahami bagaimana prosedur dan teknik dalam melakukan penilaian.

Pentingnya masalah penilaian pada guru dalam proses pendidikan memunculkan beberapa penelitian yang terkait dengan hal ini, diantaranya adalah penelitian Fatmawati, Zainul Akhyar dan Mariatul Kiptiah pada tahun 2012. Penelitian ini mengatakan bahwa guru sudah cukup mampu dalam melakukan penilaian, namun masih terdapat kekurangan dalam perencanaan dan penerapan penilaian.

Ada pula penelitian yang dilakukan Camellia dan Umi Chotimah pada tahun 2012. Penelitian ini menyatakan bahwa kemampuan guru dalam membuat instrumen penilaian domain afektif pada mata pelajaran PKn di SMP Negeri se-Kabupaten Ogan Ilir cukup baik, jika dilihat dari persentasenya, kemampuan yang dimiliki oleh guru adalah delapan puluh tiga koma tiga persen (83,3%). Oleh karena itu, pelaksanaan penilaian domain afektif pada mata pelajaran PKn di sekolah untuk mengukur sikap, miniat, konsep diri, nilai, dan moral siswa harus terus dilaksanakan oleh guru.

Selain itu, penelitian yang terkait dengan masalah ini adalah penelitian Bambang Suryadi, tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan guru-guru madrasah di wilayah Jakarta Selatan yang menjadi responden penelitian ini masih kurang, karena minimnya sosialisasi dan pelatihan tentang standar penilaian untuk Kurikulum 2013. Oleh sebab itu diperlukan sosialisasi dan pelatihan yang intensif untuk guru-guru madrasah di Jakarta Selatan sebelum Kurikulum 2013 diimplementasikan.

Untuk menambah data mengenai kemampuan guru dalam melakukan penilaian, telah dilakukan pra observasi (wawancara) terhadap guru-guru di SMK Negeri 3 Surakarta. Berdasarkan hasil pra observasi, terdapat kesamaan antara fakta yang terjadi di sekolah ini dengan fenomena di atas, yaitu kesulitan dalam melakukan penilaian. Ada beberapa poin yang menjadi permasalahan, diantaranya adalah (1) kurikulum 2013 tidak jelas dan benar-benar membingungkan, khususnya di aspek penilaian; (2) guru belum begitu paham mengenai proses penilaian secara detail; (3) kesulitan terhadap format penilaian kurikulum 13, karena banyak sekali format penilaian yang harus diisi, sehingga terpaksa guru melewati poin poin yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Sebagai contoh adalah penilaian sikap yang dilakukan secara tidak prosedural/mengira-ngira saja. Hal ini juga pastinya berdampak pada prosedur dan mekanisme penilaian yang dilaksanakan oleh guru tersebut. Jika guru sudah mengalami permasalahan dalam melakukan penilaian, dapat

dipastikan bahwa ada prosedur dan mekanisme penilaian yang tidak dijalankan ataupun tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut guru tersebut, salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kompetensi guru dalam melakukan penilaian kurikulum 2013 adalah kurangnya pelatihan. Pelatihan yang didapat selama ini adalah pelatihan dalam bentuk *workshop* yang hanya bersifat umum dan tidak mendetail. Pelatihan seperti ini dirasa beliau belum cukup untuk membuat guru lebih paham dan berkompeten dalam melakukan penilaian. Kondisi seperti ini harus segera diperbaiki dan harus ada upaya praktis dan efektif untuk menanganinya, karena jika tidak akan menghambat proses pembelajaran. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa hambatan tersebut akan berdampak pada evaluasi dan keputusan yang diambil dari hasil penilaian tersebut.

Berangkat dari permasalahan inilah, penelitian ini ingin memastikan atau menggambarkan, serta mengetahui lebih lanjut mengenai kompetensi guru dalam melakukan penilaian pada Kurikulum 2013. Maka dari itu penulis mengangkat judul **“KOMPETENSI GURU DALAM MELAKUKAN PENILAIAN KURIKULUM 2013 PADA PEMBELAJARAN AKUNTANSI DI SMK NEGERI 3 SURAKARTA”**.